

## ABSTRAK

**Muhammad Hidayat** dengan judul tesis “Analisis Hukum Terhadap Mucikari Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam” dibimbing oleh Hambali Thalib sebagai Pembimbing I, dan Baharuddin Badaru sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam terhadap mucikari; (2) mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana mucikari menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan primer yang ada dalam Al-Qur’an, Hadits dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Ketentuan pengaturan untuk menjerat mucikari di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang yang bersifat sektoral dan kasuistis. Di antaranya KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang memuat unsur “muatan yang melanggar kesusilaan”. Kemudian UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang memuat unsur jasa pornografi. Sementara itu, UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang menggunakan unsur “eksploitasi seksual”. Sedangkan di Hukum Islam mucikari merupakan salah satu perbuatan zina. Perbuatan zina dilarang tegas di dalam Al-Qur’an, larangan tersebut diatur dalam Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 33 dan Surah Al-Isra’ Ayat 32; 2) Ketentuan pertanggungjawaban pidana mucikari sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sementara dalam Islam, pelaku mucikari itu berhak dikenakan hukuman ta’zir.

Adapun sarannya adalah (1). Diperlukan adanya sanksi pidana bagi para pengguna jasa dan pemberi jasa prostitusi, karena dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktik prostitusi belum ada yang mengkriminalisasikan keduanya. 2) Diharapkan untuk meminimalisir adanya praktek prostitusi dan dampak yang akan ditimbulkan, maka perlu dicarikan hukum alternatif.

## ABSTRACT

**MUHAMMAD HIDAYAT.** with the title of the thesis "Legal Analysis of Pimps According to Indonesian Positive Law and Islamic Law" was guided by Hambali Thalib as Advisor I, and Baharuddin Badaru as Advisor II.

This research was conducted with the aim to: (1) find out how the regulation of positive Indonesian law and Islamic law against pimps; (2) knowing how criminal liability pimps according to positive Indonesian law and Islamic law.

This research uses the method of library research. This study uses secondary data in the form of primary material in the Qur'an, Hadith and the applicable laws and regulations.

The results of this study indicate that: (1) Regulatory provisions to ensnare pimps in Indonesia are regulated in several sectoral and casuistic laws. Among them the Criminal Code and Law Number 11 Year 2008 About ITE which contains elements of "content that violates decency". Then Act Number 44 of 2008 concerning Pornography which contains elements of pornography services. Meanwhile, Law Number 21 Year 2007 Regarding Trafficking in Persons uses the element of "sexual exploitation". Whereas in Islamic Law pimping is one of the acts of adultery. Adultery is strictly prohibited in the Qur'an, the prohibition is regulated in the Qur'an Surah An-Nur Verse 33 and Surah Al-Isra 'Verse 32; 2) The provisions of pimp criminal responsibility have been regulated in several laws and regulations in Indonesia, while in Islam, pimps are entitled to be subject to ta'zir punishment.

The advice is (1). Criminal sanctions are needed for service users and prostitution service providers, because of all the laws and regulations governing the practice of prostitution there is no one who criminalizes both. 2) It is expected to minimize the practice of prostitution and the impacts that will result, it is necessary to look for alternative laws.